



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/152/2015**

TENTANG

**PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG WABAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu membentuk Panitia Antar Kementerian dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Wabah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014;

3. Peraturan...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/III/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG WABAH.**

- KESATU** : Membentuk Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Wabah, yang selanjutnya disebut Panitia Antar Kementerian, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
- a. melakukan pengharmonisasian terhadap substansi materi dan teknik perancangan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Wabah; dan
 - b. melakukan rapat-rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Wabah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Antar Kementerian bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian dibebankan pada anggaran belanja Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2015

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,**


NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/152/2015
TENTANG PANITIA ANTAR
KEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG WABAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG WABAH

- Pelindung : Menteri Kesehatan
- Pengarah : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- Ketua : Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan
- Wakil Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Medikolegal
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat
Jenderal Kementerian Kesehatan
- Anggota :
1. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
 2. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 3. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
 4. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
 8. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 9. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
 10. Sekretaris...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

10. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
11. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
12. Direktur Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
13. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
14. Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
15. Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
16. Direktur Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
17. Asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Negara
18. Pocut Eliza, S.Sos, SH, MH
Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM
19. Min Usihen, SH, MH
Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM
20. Bambang Sutedja, SH, M.Han
Asisten Deputi Produktivitas Riptek Strategis, Kementerian Riset dan Teknologi
21. Hanung Cahyono, SH, LL.M.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

22. Ir. Muhammad...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

22. Ir. Muhammad Ridwan, MM, MP
Kepala Pusat Karantina Ikan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan
23. Rosa Vivien Ratnawati, SH, MSD
Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Lingkungan Hidup
24. DR. Drs. Haris Munandar, MA
Kepala Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri, Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian
25. Budi Djanu Purwanto, SH, MH
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Badan Pengawas Obat dan Makanan
26. M. Kholid Fathoni, LL.M
Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
27. Bambang Gunadi, SH, M.Si
Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan II, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian
28. Gulfan Afero
Kepala Subdirektorat Sosial Budaya dan Lembaga Non-Pemerintah, Direktorat Sosial Budaya dan OINB, Ditjen Multilateral, Kementerian Luar Negeri
29. Zahermann Muabezi
Kepala Subdirektorat Pengkajian Produk Hukum, Direktorat Hukum, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri
30. Dian Nur Astuti, SH, MH
Kepala Bidang Penyusunan Naskah Hukum, Pusat Kajian Hukum, Kementerian Sosial
31. Rahmitian, SH, MSi
Kepala Subdirektorat Kesiapsiagaan dan Mitigasi, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Kementerian Sosial

32. Reni...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

32. Reni Mursidayanti, SH, MH
Kepala Bagian Perancang Perundang-undangan I,
Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
33. Dr. Amarudin
Kepala Subdirektorat Pengawasan Norma
Kesehatan Kerja, Direktorat PNK3, Ditjen
Binwasnaker Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
34. Dr. Rer. Nat. Ahmad Saufi
Kepala Bidang Riptek Kesehatan, Obat, Pangan,
dan Pertanian, Kementerian Riset dan Teknologi
35. Drs. Rajimun Muslihudin
Kepala Bidang Agroindustri, Asdep Pengelolaan
Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah
B3 Kementerian Lingkungan Hidup
36. Reni, S.Si, Apt
Kepala Subdirektorat Standardisasi Pengaturan
PT dan PKRT, Badan Pengawas Obat dan
Makanan
37. Drs. Achmad Djazuli, SH, MM
Kepala Subdirektorat Kumint Ditkumstrahan,
Ditjen Strategi Pertahanan, Kementerian
Pertahanan
38. Samuel F Panggabean, SKM, M.Si, M.Sc.PH
Kepala Seksi Dukungan Kesehatan, Subdit
Bankes Ditkes Ditjen Kekuatan Pertahanan,
Kementerian Pertahanan
39. Simul, SH
Kepala Subbagian Peraturan Perundang-
undangan I, Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
40. wakil Kementerian Dalam Negeri
41. wakil Kementerian Perhubungan
42. wakil Kementerian Komunikasi dan Informasi
43. wakil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi
44. wakil Kementerian Pariwisata
45. wakil...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

45. wakil Badan Nasional Penanggulangan Bencana
46. wakil Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Sekretariat : 1. Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan

2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas, Sekretariat Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK